BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti barang dari hibah/sumbangan, barang sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Menurut Maulidiah (2017) penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi, termasuk di dalamnya potensi dan aset pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam

perkembangannya, pemerintah telah memperoleh suatu kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan dan peningkatan transformasi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Piri (2016) pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut paham desentralisasi, yang merupakan sebuah alat untuk mencapai satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih baik dan lebih demokratis, yang dimaksudkan dengan disertai pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah dan transfer dana dari pemerintah.

Hingga saat ini, praktik pengelolaan BMN/D terutama dalam pengamanan dan pemeliharaan masih menjadi pembahasan dan meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak. Mulai dari proses pelaksanaannya yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga kelalaian manusia. Pengamanan dan pemeliharaan BMN/D memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menjaga BMN/D agar keadaannya selalu baik dan layak digunakan.

Berdasarkan masalah di atas, penulis ingin melakukan tinjauan atas pengamanan dan pemeliharaan BMN/D berupa Kendaraan Dinas dengan menggunakan objek Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Alasan memilih objek tersebut karena penulis mempunyai relasi di instansi tersebut sehingga hal tersebut memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis ingin mengetahui

praktik pengelolaan BMN/D khususnya pengamanan dan pemeliharaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, kemudian menuangkan hasil dari tinjauan tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG SELATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sehingga dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini lebih berfokus pada topik pembahasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas?
3. Apakah ada masalah yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas serta bagaimana upayanya dalam menyelesaikan masalah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang prosedur pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas di suatu instansi daerah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas serta upayanya dalam menyelesaikan masalah tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mengenai bagaimana proses pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Kemudian pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan ringan, sedang, dan berat.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan disusunnya Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan BMD khususnya dalam pengamanan dan pemeliharaan berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh penulis pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan BMN/D yang didapatkan pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya terkait pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas.
- b) Diharapkan dapat menjadi referensi pada penulisan Karya Ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas.
- c) Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran terkait pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- d) Diharapkan dapat membantu Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dalam mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktiknya dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD khususnya Kendaraan Dinas dan gambaran umum dari proses pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas. Kemudian ada pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pengumpulan data untuk ditinjau. Kemudian berisi penjelasan singkat mengenai objek penelitian yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Hasil tinjauan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa Kendaraan Dinas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas hasil tinjauan dan saran terkait permasalahan yang ditemukan saat penulis melakukan peninjauan terhadap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan.